

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN
BERSENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA
PENANGANAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM
PERSEPTIF HUKUM TATA NEGARA**



Oleh:

Teguh Bahrudin Yusuf

201910110311489

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN
BERSENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA
PENANGANAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM
PERSEPKTIF HUKUM TATA NEGARA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

Teguh Bahrudin Yusuf
201910110311489

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2023

SKRIPSI

Disusun oleh:

TEGUH BAHRUDIN YUSUF

201910110311489

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 23 Desember 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

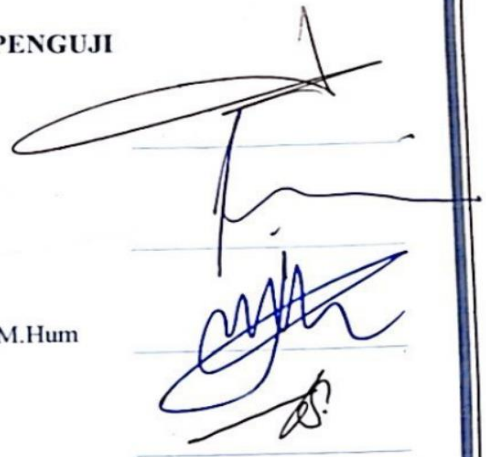
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names of the exam board members listed to the left. The top signature is the largest and most prominent, followed by three smaller signatures below it.

**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN
BERSENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA PENANGANAN
ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA
NEGARA**

Diajukan Oleh:

TEGUH BAHRUDIN YUSUF

201910110311489

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 23 Desember 2023

Pembimbing Utama,


Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Fitria Eslandiari, SH., M.H.

Dekan



Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TEGUH BAHRUDIN YUSUF

NIM : 201910110311489

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN
BERSENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA
PENANGANAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM TATA NEGARA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 17 Januari 2024

Teguh Bahrudin Yusuf

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Never regret a day in your life. Good days bring you happiness and bad days give you experience.”

“ Sukses terdiri dari rentetan kegagalan, tanpa kehilangan antusiasme. Setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusi “



ABSTRAKSI

Nama : Teguh Bahrudin Yusuf
NIM : 201910110311370
Judul : **TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA PENANGANAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA**
Pembimbing : **1. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H**
2. Fitria Esfandiary, S.H., M.H

Kehadiran Organisasi Papua Merdeka di Papua berdampak pada kestabilan negara Indonesia yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi perkembangan negara. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, secara resmi telah menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang mengatur tentang Prosedur Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji tentang kebijakan hukum dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai terorisme dan penggunaan kekuatan bersenjata Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif dengan analisis diskriptif. Berdasarkan analisis penulis terhadap isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka peningkatan status Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi terorisme harus melalui sebuah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dan penggunaan kekuatan bersenjata Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme Organisasi Papua Merdeka dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan bahwa Organisasi Papua Merdeka merupakan suatu organisasi teroris sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Kata Kunci: Terorisme, Organisasi Papua Merdeka, Tentara Nasional Indonesia, Hukum Tata Negara.

ABSTRACT

Name : Teguh Bahrudin Yusuf
NIM : 201910110311370
Title : **TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA PENANGANAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM PERSEPTIF HUKUM TATA NEGARA**

Supervisor : **1. Dr Surya Anoraga, S.H., M.H**
2. Fitria Esfandiary, S.H., M.H

The presence of the Free Papua Organization in Papua has an impact on the stability of the Indonesian state which can cause major losses for the development of the country. The government, through the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs, Mahfud MD, has officially designated the Free Papua Organization (OPM) as a terrorist organization by referring to Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. This is not in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorist Financing which regulates the Procedure for Including the Identity of Persons or Corporations on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations. This research aims to examine the legal policy in determining the Free Papua Organization as terrorism and the use of force of the Indonesian National Army in handling the Free Papua Organization viewed from the perspective of Constitutional Law. In this research, researchers used normative juridical research with descriptive analysis. Based on the author's analysis of the legal issues that are the focus of this research, increasing the status of the Free Papua Organization as a terrorist organization must go through a Determination by the Central Jakarta District Court as regulated in Article 27, Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Acts. Terrorism Financing Crime. And the use of armed force by the Indonesian National Army (TNI) in handling terrorism by the Free Papua Organization can be carried out after a court determination that the Free Papua Organization is a terrorist organization as regulated in Article 27, Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Acts. Criminal Terrorism Financing.

Keywords: *Terrorism, Free Papua Organization, Indonesian National Army, Constitutional Law..*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA PENANGANAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM PERSEPTIF HUKUM TATA NEGARA” skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Ibu Hariyati (Mama) yang selalu mencintai dan sudah menjadi sosok yang kuat serta selalu menginspirasi penulis. Terimakasih karena tidak pernah bosan dan letih untuk memberikan dukungan baik secara imateril maupun materil terhadap Penulis. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Benny Hartono telah mendukung penulis tanpa kenal lelah.;
2. Bapak Prof Dr. Drs. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;

3. Bapak Prof, Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum (Wakil Dekan I), Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H (Wakil Dekan II), Said Noor Prasetyo, S.H., M.H (Wakil Dekan III) dan Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum;
4. Bapak Dr Surya Anoraga, S.H., M.H dan Ibu I Fitria Esfandiary, S.H., M.H.. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis. Penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalmnya karena telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Serta mengajarkan penulis arti bersabar dalam hal menunggu dan sadar tidak semua yang diinginkan langsung tercapai karena semua butuh proses;
5. Bapak Syariful Alam, S.H.I.,M.H.I., selaku dosen wali penulis di Kelas G angkatan 2019 selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak mendukung selama penulis menimba ilmu;
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kiranya telah banyak memberikan pengetahuan pada Penulis selama di Fakultas Hukum;
7. Teman-teman Penulis yang telah banyak memberikan warna selama pekuliahan penulis yaitu Firlia Nurani Rakhma, Triana Dewi Cahyaningrum, Lili Lintang, m dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis

ucapkan untuk segala waktu dan dukungannya, semoga pertemanan kita terus terjaga walau nantinya terbatas oleh jarak;

8. Seluruh teman-teman awal perkuliahan pada Kelas G Penulis, semoga kita tetap menjadi keluarga, dan semoga hubungan persaudaraan dan pertemanan kita terus terjaga.

9. Terima Kasih kepada Nenek penulis Salmah dan Sepupu penulis Alma Putri yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Segala bentuk kritik dan saran akan penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa yang akan datang karena penulis sangat menyadari bahwasanya baik penulis maupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

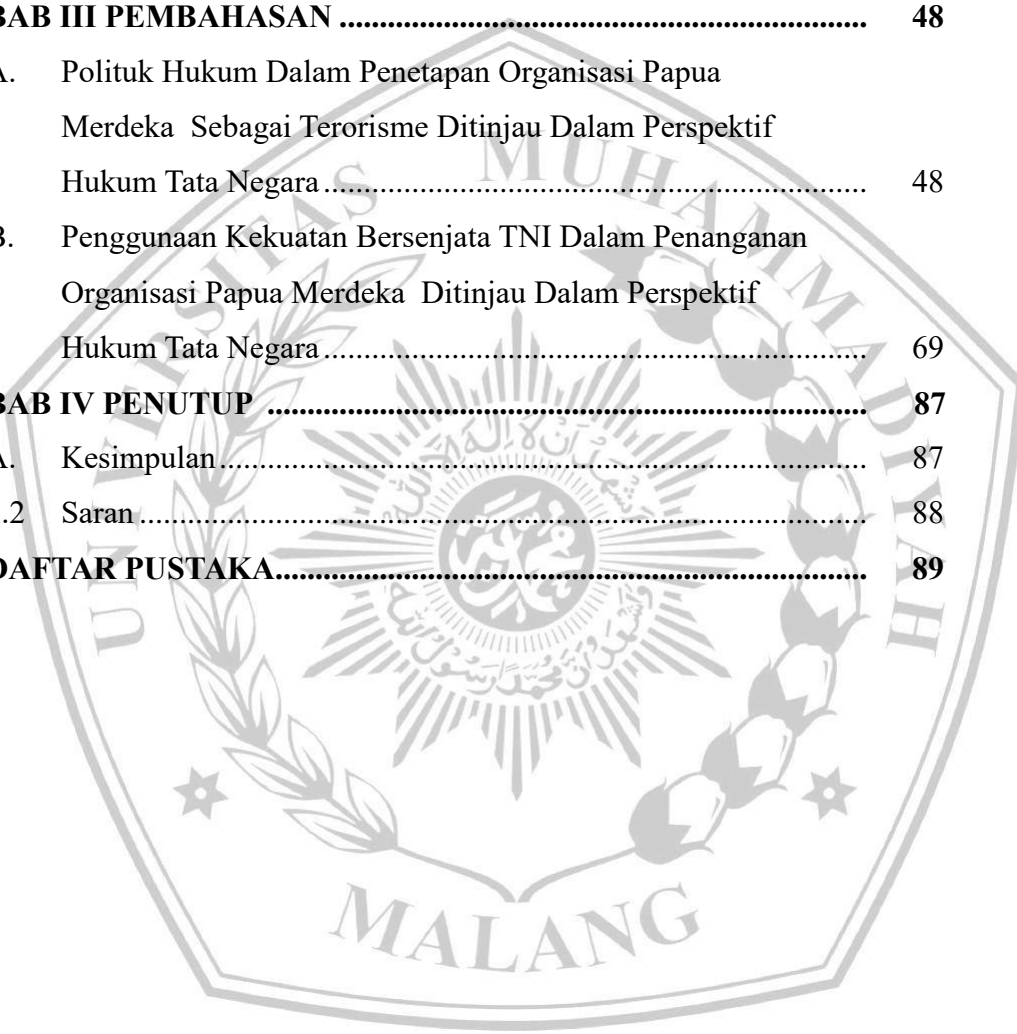
Malang, 23 Oktober 2023

Teguh Bahrudin Yusuf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Negara	21
1. Pengertian Hukum Tata Negara	21
2. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	23
3. Asas-Asas Dalam Hukum Tata Negara.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang TNI.....	30
1. Pengertian TNI.....	30
2. Tugas Pokok TNI.....	32
3. Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan TNI Untuk menjaga Pertahanan.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Terorisme	35
1. Pengertian Terorisme	35

2. Bentuk-Bentuk Terorisme.....	38
3. Terorisme Sebagai Kejahatan Luar Biasa	40
C. Tianjuan Umum Tentang Organisasi Papua Merdeka	44
1. Sejarah Organisasi Papua Merdeka dan Perkembangannya	44
2. Dinamika Organisasi Papua Merdeka dalam Melepaskan Papua dari Indonesia.....	45
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Politik Hukum Dalam Penetapan Organisasi Papua Merdeka Sebagai Terorisme Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.....	48
B. Penggunaan Kekuatan Bersenjata TNI Dalam Penanganan Organisasi Papua Merdeka Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.....	69
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89



DAFTAR TEBEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis Yang Berkaitan	10
Tabel 2. Definisi Terorisme dan Aktivitas OPM	69



DAFTAR PUSTAKA

- Achmamudin Rajab, 2016, Urgensi Penguatan BNPT dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara, Jurnal Rechtsvinding Volume 5 nomor 1, April, hlm. 16.
- Adolf, Huala., 2011, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Bandung: Keni Media, hlm. 166-199
- Agustina, Dewi., 2021, Pesawat MAF Dibakar di Intan Jaya Papua, OPM Beralasan karena Pesawat Datang Sebagai Mata-mata, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/10/pesawat-maf-dibakar-di-intan-jaya-papua-opm-beralasan-karena-pesawat-datang-sebagai-mata-mata>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023
- Al Rahab, Amiruddin, 2010, Heboh Papua, Jakarta: Komunitas Bambu.
- Andrianto, Uhana Taufiq., 2001, Mengapa Papua Bergolak, Yogyakarta: Gama Global Media.
- Anshari., 2018, Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)", Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.48, No.3, hlm.457-505.
- Arif, Muhamad., 2018, Peran dan Keterlibatan Tni Dalam Penanggulangan Terorisme- Kertas Kebijakan Ruu Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Jakarta: The Habibie Center, hlm. 8.
- Arikunto, Suharsimi., 2000, Manajemen Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 107
- Asi, Rohaiza Ahmad dkk, 2011, Pengelolaan Konflik di Indonesia-Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso, Jakarta: LIPI dan CHD.
- Asshiddiqie, Jimly., 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 100.
- Atno., Nanda Julian Utama., 2018, Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947." *Journal of Indonesian History* 7.1 Halaman 17.
- Aviv Cohen., 2013, *Prosecuting Terrorists at the International Criminal Court: Reevaluating an Unused Legal Tool to Combat Terrorism*, *Michigan State International Law Review*, Vol 20, No. 2, hlm. 220-260.

- Ayers, James R., 1996, *Military Operation Other Than War In the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era (Graduate Research Paper)*, Air Force Institute of Technology, Ohio: Wright- Patterson Air Force Base, hlm. 10.
- Boy Anugerah, 2019, Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 40, Desember, hlm. 54.
- Broek, Theo Van Den O F M., Rudolf Kambayong O F M., 2004, Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi Jayapura Sekretariat Keadilan dan Perdamaian SKP dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan LSPP. h. 3
- Bruce Hoffmann, 2007, *Inside Terrorism, Revised And Expanded Edition*, Columbia University Press: New York, hal. 27
- Chanry Andrew Suripatty, 2003, Ribuan Warga di Kampung Kimbely dan Banti Disandera Kelompok Bersenjata, <https://daerah.sindonews.com/berita/1255828/174/ribuan-warga-di-kampung-kimbely-dan-banti-disandera-kelompok-bersenjata>, diakses tanggal 6 Agustus 2023.
- Chusnein, Akbar., Akbar Kurnia Putra., 2021, Yurisdiksi Kelompok Pemberontak Pra dan Pasca Pengakuan Sebagai Subjek Hukum Internasional, Uti Possidetis: *Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2 (2021), hlm.152-166.
- CNN Indonesia, 2021, 1 Desember, Sejarah Pengakuan Papua yang Dicap HUT Organisasi Papua Merdeka, [https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211130140721-20-727937/1-desember-sejarah-pengakuan-papua-yang-dicap-hut-Organisasi Papua Merdeka](https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211130140721-20-727937/1-desember-sejarah-pengakuan-papua-yang-dicap-hut-Organisasi-Papua-Merdeka), diakses tanggal 6 Agustus 2023 hlm 8
- CNN Indonesia, 2021, OPM Akui Tembak Polisi saat Serang Bandara Nduga Papua, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200111181016-20-464484/opm-akui-tembak-polisi-saat-serang-bandara-nduga-papua>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023.
- CNN Inonesia., 2022, OPM Kembali Tembak Mati Satu Anggota TNI Saat Kontak Senjata, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220206105150-20-755614/opm-klaim-tembak-mati-satu-anggota-tni-saat-kontak-senjata-intan-jaya>, diakses pada tanggal 3 Juli 2023
- CNNIndonesia, 2019, Moeldoko Ingin Kelompok Bersenjata Papua Dicap Separatis, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190309013602-20-375728/moeldoko-ingin-kelompok-bersenjata-papua-dicap-separatis>, diakses tanggal 29 Oktober 2021.

- Costa, Fabio Maria Lopes., 2021, Aksi Kriminal Bersenjata di Papua Sepanjang 2022 Telan 53 Jiwa, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/28/53-korban-jiwa-akibat-aksi-kkb-sepanjang-tahun-2022>, diakses pada tanggal 4 Juli 2023.
- Costa, Fabio Maria Lopes., 2021, Helikopter di Areal PT Freeport Indonesia Ditembaki, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/06/helikopter-di-areal-pt-freeport-indonesia-ditembaki/>, diakses pada 3 Juli 2023
- Denny Puspitasari., Sunny Ummul Firdaus., Agus Riwanto., 2016, Peranan Tni Dalam Pemberantasan Terorisme Perpektif Pertahanan Keamanan Negara, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Hlm 76
- Detiknews, 2018, Hanura Minta TNI Pimpin Perburuan KKB, Komnas HAM punya Pendapat Beda, <https://news.detik.com/berita/d-4335586/hanura-minta-tni-pimpin-perburuan-kkb-komnas-ham-punya-pendapat-beda>, diakses tanggal 6 Agustus 2023.
- Devira Prastiwi., 2018, Top 3 News: 31 Pekerja Jalan Trans Papua Dibunuh karena Foto HUT Organisasi Papua Merdeka, [https://www.liputan6.com/news/read/3799441/top-3-news-31-pekerja-jalan-trans-papua-dibunuh-karena-foto-hut-Organisasi Papua Merdeka](https://www.liputan6.com/news/read/3799441/top-3-news-31-pekerja-jalan-trans-papua-dibunuh-karena-foto-hut-Organisasi-Papua-Merdeka), diakses tanggal 6 Agustus 2023
- Dyah Ochtorina Susanti., Efendi A'an., 2018, Penelitian Hukum (*Legal Research*), Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, A'an., Dyah Ochtorina Susanti., 2014, Penelitian Hukum (*Legal Research*), Sinar Grafika: Jakarta.
- Erdianto, Kristian, 2018, Mengikat, Konsultasi ke DPR Terkait Penyusunan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/27/12542731/mengikat-konsultasi-ke-dpr-terkait-penyusunan-perpres-pelibatan-tni-atasi>, diakses tanggal 19 Agustus 2023.
- Farhansyah, Muhammad., 2022, Penegakan Hukum Pada Separatisme Di Papua Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional, Skripsi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Folman P. Ambarita, 2018, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember, hlm. 150.

- Georgy Mishael, 2016, Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, *Diponegoro Law Review*, Volume 5 Nomor 2, hlm. 1
- Hakim, Luqman., 2004, *Terorisme Indonesia*, Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta (FSIS), hlm 29
- Harjuna, Muhammad, 2018, Islam dan Resolusi Konflik, *Jurnal Religi*, Vol. XIV, No. 1
- Hafiz, Muhammad., 2021, Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional, Skripsi: Universitas Padjadjaran
- Heniarti, Dini Dewi., 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. V
- <https://www.law-justice.co/artikel/108197/pendeta-ungkap-kekejaman-kkb-terhadap-gadis-gadis-papua-diperkosa/> diunduh pada 1 April 2022
- Irwansyah, Henry., 2013, *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*, Lampung: Percetakan Osa.
- JPNN.com, 2018, Sukamta: Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua itu Teroris”, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/12/05/155997/sukamta-kelompok->, diakses pada tanggal 6 September 2023
- Junaidi, Hamzah., 2013, *Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam*. Sulesana., Volume 8 Nomor 2, hlm 36
- Komariah, Mamay., 2017, *Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, *Jurnal Galuh Justisi* Vol 5, No 1
- Kusnardi, Moh., Harmaily Ibrahim., 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Pusat studi hukum tata negara FH UI, hlm. 18-19
- Kusuma, Ardli Johan., M. Chairil Akbar Setiawan., Anwar Ilmar., Nurmasari Situmeang., 2022, Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka (Organisasi Papua Merdeka) Menjadi Organisasi Teroris Oleh Pemerintah Indonesia: Sebuah Analisis Dalam Perspektif HAM, *Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah* Vol 7, No 1
- L Maria Matildha., Flora Pricilla Kalalo., Fernando J. M. M. Karisoh., 2021., Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Kelompok Terori, *Lex Administratum*, Vol. X/No. 1/

- Lasina., 2009, Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia” Risalah Hukum Vol. 5 No. 2, hlm. 1.
- Loebby Loqman, 1993, Delik Politik di Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co., hlm. 1.
- Mabes TNI, 2006, Buku Saku Prajurit, Edisi Maret, Badan Pembina Hukum.
- Mambraku, Nomensen., 2015, Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik, dalam Jurnal, Kajian Vol. 20 No. 2.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan), Buku Keempat, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, hlm. 115.
- Marfuatul Latifah., 2018, Perlindungan HAM Dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris di Indonesia, Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, hlm 18
- Mark A. Drumbl, Atrocity, 2017, *Punishment, and International Law, Chater 1: Extraordinary, Crime and Ordinary Punishment: An Overview*, Cambridge University Press, hlm. 4.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Matildha, Maria., Flora Pricilia Kalalo., Fernando J.M.M. Karisog., 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Pentetapan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Kelompok Teroris, Lex Administratum Vol X/No.1
- Mauna, B., 2015, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Hlm. 79
- Mengko, Diandra Megaputri., 2015, Problematika Tugas Perbantuan TNI, Jurnal Kemanan Nasional Vol. 1, No. 2, hlm. 177
- Mishael, Georgy., Joko Setiyono., Soekotjo Hardiwinoto., 2016, Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2,
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. Kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 29.

- Mohamad, Simela Victor., 2002, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, h. 106
- Monika Suhayati, 2013, *Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Negara Hukum: Vol. 4, No. 2, hlm 17
- Mustaqim, Abdul, 2014, *Konflik Teologis dan Kekerasan Agama dalam Kacamata Tafsir Al-Qur'an*, Jurnal Episteme, Volume 9, Nomor 1.
- Nurhadi, Fikri., 2017, *Extra Ordinary Crime Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 21
- Pane, Fahmi Alfansa P., 2018, *Mendefinisikan Organisasi Papua Merdeka dan KKB*, [https://www.republika.co.id/berita/pjad4n440/mendefinisikan-Organisasi Papua Merdeka-dan-kkb](https://www.republika.co.id/berita/pjad4n440/mendefinisikan-Organisasi-Papua-Merdeka-dan-kkb), diakses tanggal 6 Agustus 2023.
- Pinter Politik, 2020, *Sejarah OPM : Juang Merdeka di Tanah Papua*. [Online]. Tersedia : <https://www.pinterpolitik.com/sejarah-opm-juang-merdeka-di-tanahpapua/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023
- Prahassacitta, Vidya., 2016, *The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?* Jurnal Humaniora, Vol. 7 No. 4 hlm. 513-521
- Prasojo, Liando Azam., 2022, *Penetapan Organisasi Papua Merdeka Sebagai Organisasi Terorisme Dan Implikasinya Dalam Penegakan Hukum*, Skripsi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Pudjosewojo, Kusumadi., 2004, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-10, Jakarta: Sinar Grafika, , hal. 86
- Puspa, Yan Pramadya., 1997, *Kamus Bahasa Belanda*, Semarang, Penerbit Aneka Ilmu, hlm. 445
- Putra, Nanda Perdana., 2021, *Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Sebagai Kelompok Teroris*, <https://www.liputan6.com/news/read/4545278/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-sebagai-kelompok-teroris>, diakses tanggal 6 Agustus 2023
- Ranawijaya, Usep., 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm, 29-30
- Robertson., 2021. *Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) Untuk Memulihkan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Studi

Kasus : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). isertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

Seta, Putra Dewangga Candra., 2021, Aksi KKB Papua Bakar BTS Telkomsel Bikin Warga Susah, OPM Ngotot Tak Mau Terima Fasilitas Pemerintah, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/01/12/aksi-kkb-papua-bakar-bts-telkomsel-bikin-warga-susah-opm-ngotot-tak-mau-terima-fasilitas-pemerintah>, diakses pada 3 Juli 2023

Smith, Paul J., 2008, *The Terrorism Ahead, Confronting Transnational Violence in the Twenty-first Century*, M.E., Sharp, New York P.12

SuaraMerdeka.com., 2018, Pesawat Angkut Pasukan Brimob Ditembaki Tentara Organisasi Papua Merdeka, <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-0455443/pesawat-angkut-pasukan-brimob-ditembaki-tentara-Organisasi-Papua-Merdeka?page=all>, diakses tanggal 6 Agustus 2023.

Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 16.

Sugiyono., 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV. hlm.291

Suny, Ismail., 1986, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta, Aksara Baru

Syaputra, Yusrizal Adi., Ansor Lubis., Hera Fauziah, 2023, Hukum Tata Negara, Purbalingga: CV Eureka Media Askara

Trianti, Lthfia Maharani., 2022, Deretan Aksi Serangan KKB Papua sejak Januari-Agustus 2022, <https://www.metrotvnews.com/play/kj2CA6y-deretan-aksi-serangan-kkb-papua-sejak-januari-agustus-2022>, diakses pada tanggal 4 Juli 2023.

Tribun Papua., 2021, Ini Sejarah Singkat OPM Organisasi Terlarang di Indonesia dan kejahatan Masa Lalu, 15 September 2021, <https://papua.tribunnews.com/2021/11/15/ini-sejarah-singkat-opm-organisasi-terlarang-diindonesia-dan-kejahatan-masa-lalu?page=4>, diakses pada tanggal 2 Juli 2023

Triskaputri, Rifana Meika., 2019, Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia, *Journal of Terrorism Studies*, Vol. 1, No. 1, hlm 9

Triyoga, Hardani., 2021, Dicurigai Mata-Mata TNI, 1 Warga Sipil Tewas Ditembak OPM, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1344389-dicurigai-mata-mata-tni-1-warga-sipil-tewas-ditembak-opm?page=all>, diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

Tualeka, M. Nur Wahid., 2017, Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern, Jurnal AL-Hikmah, Vol. 03, No. 01.

Ubbe, Ahmad., 2018, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial, <http://www.pbhn.go.id/data/documents/pkj-2011-10.pdf>, diakses pada 25 Oktober 2023

Wahid, Abdul., Sunardi., Muhammad Imam Sidik., 2004, Kejahatan Terorisme Perspektif agama,ham dan hukum, Bandung :PT Refika Aditama, hlm. 59.

Yunato, Ignatius., 2014, Human Security di Papua pada Masa Pemerintahan Jokowi: Tinjauan terhadap Political Security di Papua, h. 46

Peraturan Undang-Undang:

KUHP

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Undang-undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini:

Nama : Teguh Bahrudin Yusuf

Nim : 201910110311489



Dengan Judul Skripsi :

*Tinjauan Yuridis Kebiasaan Penggunaan Kekuatan Bersenjata
Tentara Nasional Indonesia Pada Penanganan organisasi
papua merdeka dalam Perspektif Hukum Tata Negara*

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

17/11/24
Cholidah



30 November 2013

Cholidah, SH., MH